

ABSTRAK

Muhamad Mugni, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang Maret 2017, Hubungan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peningkatan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Arjawanangun).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut undang undang desa) merupakan seperangkat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang nomor 6 tahun 2104 tentang desa memiliki asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kepatian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif, sehingga hal ini perlu dilakukan dengan menerapkan *good governance* yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, pengawas, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, penegak hukum. Sehingga dalam pengelolaan dana desa yang ada bias berjalan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui “Pengaruh Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peningkatan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa” Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatang Arjawanangun- Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kuisioner, observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dijalankan oleh pemerintah desa di Kecamatan Arjawanangun sudah berjalan cukup

maksimal dan mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan dana desa. Dimana pemerintah desa telah menjalankan program alokasi dana desa sesuai dengan aturan yang ada dan melibatkan semua unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Sehingga hasilnya bias dirasakan semua kalangan dalam menjalankan program alokasi dana desa.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Good Governance*, Dana Desa

ABSTRACT

Muhammad Mugni, Accounting Program, Faculty of Economy, University of Muhammadiyah Semarang, Semarang March 2017, The Relation of the Implementation of Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 About Village towards the Enhancement of Good Governance in the Management of Village Fund (Empirical Study on the Government of village in Arjawinangun District)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 about Village or a Village Law is a set of role about the management of the village government with the consideration for being develop in various forms. So it needs to be protected and to be empowered to make it strong, progressive, independent, and democratic that makes the government foundation and development become the equitable, prosperous, and safe society. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 has a legal basis on manage the village government which is manage about roles, professionalism, proportionality, accountability, effectiveness and efficiency, local wisdom, diversity, participative, so it needs to be implemented in the forms of good governance which is include accountability, supervisor, responsiveness, professionalism, effectiveness and efficiency, transparency, equality, future insight, participation, law enforcer with the result of village fund management can proceed as the expectation.

This research is aimed to find out “The Impact of the Implementation of Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 About Village towards the Enhancement of Good Governance in the Management of Village Fund” Empirical Study on the Government of village in Arjawinangun District, Cirebon.

This research used the qualitative descriptive method by collecting data from questionnaires, observations, and interviews.

The result of this research shows that the implementation of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 about village run by the Government of Arjawinangun district is quite maximal and create a good governance in manage the village fund. The government successfully run the fund allocation program equivalent the regulation and also involve all elements such as government and citizen that makes the result can be accepted for everybody to run the fund allocation program.

Keywords : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 about village, Good Governance, Village Fund.